

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2025



Diskominfo
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diterbitkan.

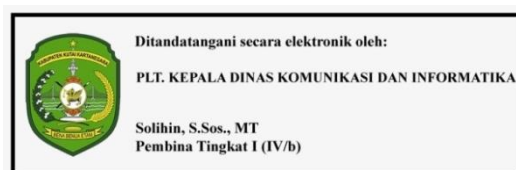
Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. RKT ini merupakan rencana kerja tahunan ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. RKT diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan acuan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya RKT tahun 2025 ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika lebih konkrit.

Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Harapan kami, RKT ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Tenggarong, 14 Januari 2025



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
BAB II VISI, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	5
2.1 Visi	5
2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	5
BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	7
3.1 Program dan Kegiatan	7
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan	7
b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan	7
c. Rumusan Program dan kegiatan	8
d. Tabel Rencana Kerja Tahunan dan Kegiatan	9
BAB IV PENUTUP	15

BAB I.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah (PD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKT PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RKT PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.
3. RKT PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan PD untuk mengetahui kinerja PD.

Oleh karena itu.....

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
20. Peraturan.....

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB II.....

BAB II

VISI, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2023 yaitu " Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasab Lingkungan.

2.2 TUJUAN , SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Misi ke-1 (Satu) yaitu " Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani " Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Target (2025)	Target Akhir Renstra 2026
1	Meningkatnya Kualitas		Nilai	3,22	3,29

	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE				
2		Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,11	3,16
3		Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Nilai	3,40	3,45
4		Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Nilai	3,20	3,25
		Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai	3,14	3,25

BAB III.....

BAB III

Rencana Kerja Tahunan dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Program dan Kegiatan

a) Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah Visi Bupati Kutai Kartanegara “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Untuk mencapai Visi tersebut maka dilakukan berbagai upaya strategis, salah satu upaya itu dituangkan dalam Sasaran RPJMD Kabupaten kutai Kartanegara. Dalam Sasaran RPJMD, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 Tujuan dan 4 Sasaran yang sudah ditetapkan melalui turunan Sasaran RPJMD Kabupaten antara lain :

Tujuan :

”Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE
2. Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE
3. Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE
4. Meningkatkan Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE

b) Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Program yang direncanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Rutin dan 4 (empat) Program Urusan Pemerintahan.

Rincian Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Dari 5 (lima).....

Dari 5 (lima) Program diatas, dijabarkanlah ke dalam bentuk Kegiatan dan Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 14 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif).

Kebutuhan dana pagu dari seluruh Program / Kegiatan tersebut pada tahun 2025 sebesar **Rp. 305.607.466.353,- (Tiga ratus lima miliar enam ratus tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah)**

- c) Rumusan Program dan Kegiatan memiliki beberapa sub kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dikarenakan beberapa hal antara lain :
- a. Adanya Penyesuaian Output Indikator Sub Kegiatan
 - b. Masih Kekurangan belanja makan dan minum hari hari keagamaan dan acara adat
 - c. Tambahan Anggaran Pembuatan Gudang Barang Aset dan Record Center Arsip Lanjutan
 - d. Pengurangan Anggaran karena kegiatan pemeliharaan jasa clening servis masuk dikegiatan lain, Pengurangan untuk Belanja makan dan minum di sub kegiatan Penyediaan bahan Logistik kantor
 - e. Tambahan Anggaran untuk Pengadaan Call Center 112
 - f. Tambahan Anggaran untuk Pembangunan Tower Repeater sebanyak 7 Desa Hasil Kesepakatan Verifikasi Rancangan Renja PD dan 1 Desa Usulan Musrenbang Kecamatan
 - g. Tambahan Pagu untuk Kegiatan Kolaborasi Perangkat Daerah dengan DIARPUS dalam rangka pendampingan Perluasan Implementasi Aplikasi Srikandi ke OPD, Kelurahan dan Desa
 - h. Tambahan kegiatan baru untuk memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pembina Data (BPS) sesuai dengan amanat Perpres 39 Tahun 2019
 - i. Tambahan kegiatan baru untuk mengakomodir penyelenggaraan statistik sektoral dengan tambahan anggaran dari Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

d) Tabel.....

d) Tabel Rencana Kerja Tahunan dan Kegiatan sebagai berikut :

**RUMUSAN RENCANA KERJA TAHUNAN DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
					Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE		3,22 Nilai		
					Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE		3,11 Nilai		
					Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE		3,40 Nilai		
					Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE		3,20 Nilai		
					Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE		3,14 Nilai		
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		88 Persen	32.906.658.683	
2	1	1	2.0		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Dokumen	1.000.000.000	
2	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarrong	3 Dokumen	450.000.000	APBD
2	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarrong	7 Laporan	50.000.000	APBD
2	1	1	2.0		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarrong	1 Laporan	150.000.000	APBD
2	1	1	2.0		Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	50.000.000	APBD
2	1	1	2.0		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tenggarrong	1 Data	250.000.000	APBD

2	1 6	1	2.0 1		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggar ong	1 Berita Acara	50.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		2 Laporan	11.232.668.414	APBD
2	1 6	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggar ong	938 Orang/Bul an	10.671.376.250	APBD
2	1 6	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan.Semesteran SKPD	Tenggar ong	1 Laporan	25.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggar ong	4 Laporan	511.292.164	APBD
2	1 6	1	2.0 2		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggar ong	1 Laporan	25.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		4 Dokumen	105.000.000	
2	1 6	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		41 Dokumen	25.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 3		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	50.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 3		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	30.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	1.150.000.000	
2	1 6	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartaneg ara	80 Orang	1.150.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah		5 Layanan	4.980.000.000	
2	1 6	1	2.0 6	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000	APBD

2	1 6	1	2.0 6	4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	3.450.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 6	5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	550.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 6	9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	250.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 6	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70 Laporan	400.000.000	APBD
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2 Dokumen	320.000.000	
2	1 6	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen	2.050.000.000	
2	1 6	1	2.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggar ong	1 Unit	850.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggar ong	18 Unit	1.200.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	10.957.190.269	
2	1 6	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggar ong	1 Laporan	5.100.000	APBD
2	1 6	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tenggar ong	1 Laporan	2.397.726.445	APBD
2	1 6	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Tenggar ong	3 Laporan	8.554.363.824	APBD
2	1 6	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		100 Unit	1.431.800.000	
2	1 6	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		20 Unit	381.800.000	APBD
2	1 6	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	550.000.000	APBD
2	1 6	1	2.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15 Unit	500.000.000	APBD

2	1 6	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik		100 Persen	90.770.020.000	
2	1 6	2	2.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola		56 OPD	90.770.020.000	
2	1 6	2	02. 01	0 6	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		5 Laporan	200.000.000	APBD
2	1 6	2	02. 01	0 2	Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		50 Komunitas	1.000.000.000	APBD
2	1 6	2	02. 01	0 4	Dukungan Administratif, Keuangan, Dan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika		1 Laporan	100.000.000	APBD
2	1 6	2	02. 01	1 0	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		5 Pemohon	300.000.000	APBD
2	1 6	2	02. 01	1 2	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik		2 Persentase	75.000.000	APBD
2	1 6	2	02. 01	0 8	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, Dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		11 Rekomendasi	1.160.000.000	APBD
2	1 6	2	02. 01	0 5	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik		2 Persentase	200.000.000	APBD
2	1 6	2	02. 01	0 7	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		250 Media	87.025.000.000	APBD
2	1 6	2	02. 01	0 1	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun		1 Dokumen	160.020.000	APBD
2	1 6	2	02. 01	1 1	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik		850 Konten	300.000.000	APBD
2	1 6	2	02. 01	0 3	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		16 Orang	250.000.000	APBD

2	1 6	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD		100 Persen	173.630.787.670	
2	1 6	3	2.0 2		Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola e- government		56 OPD	173.630.787.670	
2	1 6	3	02. 02	0 3	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE Di Lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		1 Laporan	150.000.000	APBD
2	1 6	3	02. 02	0 1	Koordinasi Penyusunan Dan/Atau Reviu Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan		2 Dokumen	300.000.000	APBD
2	1 6	3	02. 02	0 9	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		3 Dokumen	400.000.000	APBD
2	1 6	3	02. 02	1 0	Pembangunan Dan/Atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		1 Aplikasi	100.000.000	APBD
2	1 6	3	02. 02	0 7	Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas		58 Unit	250.000.000	APBD
2	1 6	3	02. 02	1 1	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		56 Perangkat Daerah	61.662.278.842	APBD
2	1 6	3	02. 02	1 2	Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional		2 Layanan	75.000.000	APBD
2	1 6	3	02. 02		Koordinasi Dan Fasilitasi Promosi Literasi Spbedan/Atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		6 Dokumen	100.000.000	APBD
2	1 6	3	02. 02		Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		56 Perangkat Daerah	110.593.508.828	APBD
2	2 0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.450.000.000	
2	2 0	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia		100 Persen	5.250.000.000	
2	2 0	2	2.0 1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia		56 OPD	5.250.000.000	

2	20	2	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		130 Orang	200.000.000	APBD
2	20	2	2.01	02	Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		100 Persentase	1.300.000.000	APBD
2	20	2	2.01	03	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		100 Presentase	3.250.000.000	APBD
2	20	2	2.01	04	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		1 Dokumen	200.000.000	APBD
2	20	2	2.01	06	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik		1 Dokumen	300.000.000	APBD
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				850.000.000	
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi		18,97 Persen	3.050.000.000	
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah		11 OPD	2.850.000.000	
2	21	2	02.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2 Laporan	1.300.000.000	APBD
2	21	2	02.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		2 Laporan	200.000.000	APBD
2	21	2	02.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		1 Perangkat Daerah	1.350.000.000	APBD
2	21	2	02.02		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah		1 Layanan JKS	200.000.000	
2	21	2	02.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Tenggarrong	1 Perangkat Daerah	200.000.000	APBD
TOTAL									305.607.466.353	-

BAB IV.....

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu tujuan dari akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance). Rencana Kerja tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang merupakan pedoman bagi Perangkat daerah dalam Penyusunan Rencana strategis 2021 – 2026 yang sifatnya tahunan, memuat sasaran, program/kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 ini merupakan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Kegiatan yang diakomodasikan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan ini adalah seluruh kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran dan menjadi pedoman perencanaan kinerja oleh seluruh aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara .

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparansi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025.

Tenggarong, 14 Januari 2025

